

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PANTAI
POPOH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu

Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh :

Donny Ryansyah

115120600111004



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PANTAI POPOH DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**Donny Ryansyah
NIM:115120600111004**

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif Sarjana Ilmu
Pemerintahan pada tanggal
13 Juli 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji:

Sekretaris Majelis Penguji:

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
NIK. 2013048811042001

Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A
NIK. 2016078805142001

Anggota Majelis Penguji I:

Anggota Majelis Penguji II:

Dr. Dra. Alifiulahtin Utamingsih, M.Si
NIK. 2012096704091002

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
NIP. 198108252015041001

Malang, Juli 2018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si. Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama: Donny Ryansyah

NIM: 115120600111004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwas kripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017** adalah benar karya penyusunan karya ilmiah skripsi yang disusun sendiri oleh peneliti. Hal-hal yang bukan dari karya penyusunan peneliti dalam skripsi yang dimaksud, diberikan dan citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka serta lampiran. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan peneliti tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang peneliti peroleh dari penyusunan tugas akhir yaitu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang dimaksud.

Malang, Juli 2018

Pernyataan dibuat oleh:

Donny Ryansyah.....

NIM: 115120600111004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Diri

1. Nama : Donny Ryansyah
2. Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 November 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Belum Menikah
5. Tinggi, Berat Badan : 170 cm, 60 Kg
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Adil Gg. Pegadaian No. 16, RT 04/RW 01, Ds. Ngunut, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung.
8. No. HP : 085791900722
9. Email : donnyryansyah7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pamardi Sunu (Tahun 1998-1999)
2. SD : SDN Ngunut 1 (Tahun 1999-2005)
3. SMP : SMP N 3 Ngunut (Tahun 2005-2008)
4. SMA : SMA N 1 Ngunut (Tahun 2008-2011)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan (2011-2018)

C. Pengalaman Organisasi dan Kepanitian

1. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Divisi Kajian. (2012-2013)
2. Perkampungan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai panitia penyelenggara Seksi Transportasi. (2013)
3. *Leadership of Government* (LOG) sebagai panitia penyelenggara Seksi Konsumsi. (2013)
4. Saiful Mujani *Riset and Consulting* (SMRC) sebagai *Surveyor* atau Peneliti Lapangan. (2013)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua peneliti yang sejauh ini telah terus tanpa lelah untuk memberikan dukungan, semangat, bimbingan, serta doanya yang semata-mata ditujukan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti dalam masa perkuliahannya. Yakni Ayahanda peneliti Abdul Rosul dan Almarhum Ibunda peneliti Mujiah beserta adik peneliti Rohmatul Adlha. Dimana mereka merupakan sumber dan alasan dari semangat dan usaha peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar sarjana dan menyelesaikan studi strata satu. Untuk semua jasa dan pengorbanan keluarga peneliti, maka ucapan terimakasih sebesar-besarnya, peneliti persembahkan kepada beliau-beliau. Meskipun mungkin persembahan ucapan terimakasih dan segala bentuk balasan dalam bentuk upaya apapun tidak akan mampu membalas apa yang sudah keluarga berikan kepada peneliti.

Malang, Juni 2018

Peneliti

Donny Ryansyah.....
NIM: 115120600111004

ABSTRAK

Donny Ryansyah, Program Study Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2018, Pengelolaan Pariwisata Pantai Popoh Di Kabupaten Tulungagung, Dosen Pembimbing : Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP

Pariwisata adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian diberbagai negara. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengembangkan pariwisata adalah Kabupaten Tulungagung. Potensi Kabupaten Tulungagung adalah memiliki banyak pantai. Tulungagung memiliki banyak pantai karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Hal ini membuat pemerintah fokus untuk mengembangkan ekonomi dan pariwisata pada tahun. Salah satu pantai unggulan di Tulungagung adalah Pantai Indah Popoh yang telah beroperasi sejak tahun 1986 hingga sekarang. Pengembangan Popoh sebagai daerah tujuan wisata dikembangkan oleh Sutera Bina Samudera tahun 1986 dan sekarang dikembangkan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori G. Edward III yang terdiri dari aspek komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Lokasi penelitian di Pantai Indah Popoh dan Dinas Pariwisata, masyarakat, , dan Perusahaan Aneka Usaha sebagai informan. Hasil penelitian ini Dinas Pariwisata telah melibatkan masyarakat dan berbagai pihak untuk pengembangan Pantai Popoh dan membuat kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu promosi. Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan telah mengetahui fungsinya sebagai masyarakat namun belum mampu mengembangkannya. Alasannya adalah pemahaman masyarakat masih kurang dan perlu sosialisasi lebih. Masyarakat Popoh telah terlibat dalam industri pariwisata sebagai pedagang dan karyawan dalam manajemen Popoh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata pantai popoh oleh pemerintah daerah belum terprogram secara baik dan belum berjalan sesuai dengan rencana baik dari aspek komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Disposisi, dan Struktur Birokrasi . Hal ini bisa dilihat dimana belum adanya penanganan secara cepat dalam hal perbaikan akses jalan. Namun dari sarana prasarana sudah cukup memadai dengan dirawatnya berbagai sarana dan prasarana yang ada di Pantai Popoh.

Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata, Pantai Popoh

ABSTRACT

Donny Ryansyah, Governmental Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Malang, Year 2018, Tourism Management Popoh Beach In Tulungagung District, Advisor: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si and Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP

Tourism is one of the sectors that get attention in various countries. One of the areas in East Java that develop tourism is Tulungagung regency. The potential of Tulungagung Regency is to have many beaches. Tulungagung has many beaches because it borders directly with the Indian Ocean to the south. This makes the government focus to develop the economy and tourism in the year. One of the leading beaches in Tulungagung is Pantai Indah Popoh which has been operating since 1986 until now. The development of Popoh as a tourist destination was developed by Sutera Bina Samudera in 1986 and is now developed by the government. This research uses G. Edward III theory consisting of communication aspect, Human Resources (HR), Disposition, and Bureaucratic Structure. In addition, this study also uses interviews and documentation for data collection. Location of research in Pantai Indah Popoh and Tourism Office, community, and Various Business Company as informant. The results of this study Tourism Department has involved the community and various parties for the development of Popoh Beach and make cooperation with private parties to assist the promotion. The community as one of the stakeholders has known its function as a society but has not been able to develop it. The reason is that people's understanding is still lacking and need more socialization. Popoh people have been involved in the tourism industry as traders and employees in Popoh management. Based on the research result, it can be concluded that the management of popoh beach tourism by the local government has not been well programmed and has not run in accordance with the good plan of communication aspect, Human Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This can be seen in the absence of fast handling in terms of road access improvements. However, the infrastructure is sufficient with the maintenance of various facilities and infrastructure in Popoh Beach.

Keywords: Tourism Policy, Popoh Beach

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan salah satu kewajiban yang harus ditempuh. Kewajiban dalam menyelesaikan syarat pendidikan pada jenjang studi Strata 1 (satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang. Dalam bentuk penyusunan tugas akhir berupa penyusunan Skripsi. Skripsi yang dimaksud berjudul **Implementasi Kebijakan Pariwisata Pantai Popoh Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017**

Pada penyusunan Skripsi ini peneliti telah mendapat banyak masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang bersedia melancarkan setiap urusan penelitian dan penyusunannya. Sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, untuk hal tersebut perkenankanlah penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Serta ucapan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada;

1. Ibunda beserta Ayahanda tercinta yang terus mendoakan, merestui dan mendukung dalam setiap pelaksanaan dan usaha peneliti untuk meraih gelar sarjana dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Joko Purnomo, S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dimana telah membantu dalam setiap urusan peneliti yang berhubungan dengan setiap pengesahan dan rekomendasi terkait urusan studi peneliti.

3. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Siselaku Dosen Pembimbing Pertama Skripsi, yang telah bersedia bersabar serta bijaksana membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Rachmad Gustomy , S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi, yang juga telah bersedia memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Siselaku Dosen Penguji Pertama Atau Ketua Majelis Penguji Ujian Skripsi/Kompre.Dimana telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti, serta memberi masukan untuk penyempurnaan skripsi.
6. Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A, selaku Dosen Penguji kedua atau Sekretaris Majelis Penguji Ujian Skripsi/Kompre. Dimana telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti, serta memberi masukan untuk penyempurnaan skripsi.
7. Bapak Gatot Sunu Utomo selaku Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung beserta seluruh jajarannya dan seluruh warga desa yang menjadi informan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dimana telah bersedia menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian dan memberikan setiap data dan informasi yang dibutuhkan.

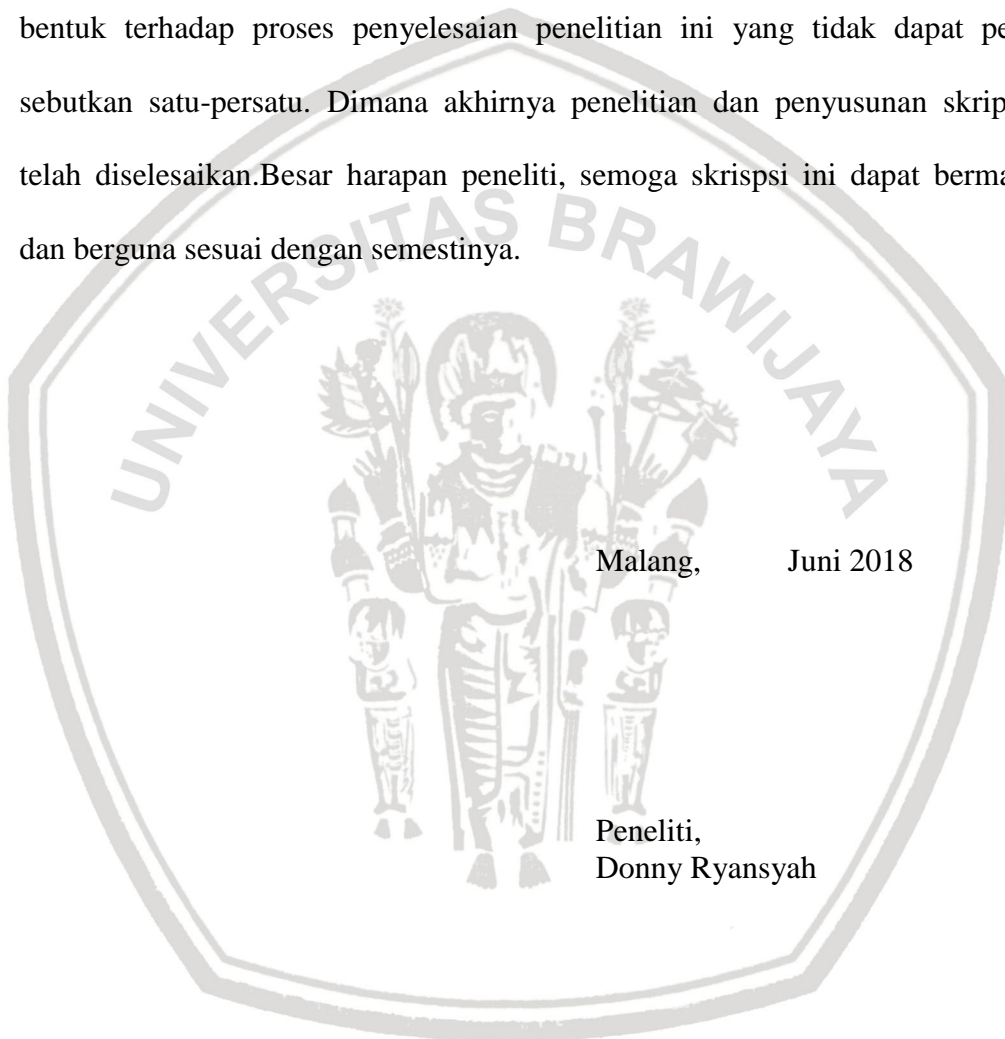
8. Seluruh rekan-rekan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang turut membantu setiap urusan penyusunan skripsi ini, dimana tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Masih banyak lagi pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk terhadap proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Dimana akhirnya penelitian dan penyusunan skripsi ini telah diselesaikan. Besar harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna sesuai dengan semestinya.

Malang,

Juni 2018

Peneliti,
Donny Ryansyah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. KERANGKA TEORI	
2.1. Penelitian Yang Relevan	11
2.2. Kebijakan Publik	16
2.3. Siklus Kebijakan Publik	18
2.4. Model Implementasi George Edward III	21
2.5. Konsep Daerah Pesisir	26
2.6. Konsep Pengembangan Daerah Pesisir	26

2.7. Konsep Pariwisata	28
2.8. Kerangka Pikiran	29

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Fokus Penelitian	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik Penentuan Informan	37
3.6. Teknis Analisis Data	39

IV. GAMBARAN UMUM PANTAI POPOH

4.1. Keadaan Umum Wilayah	43
4.1.1 Kondisi Geografis	43
4.1.2 Administrasi Wilayah	43
4.1.3 Luas dan Batas Wilayah	44
4.1.4 Kondisi Topografi	45
4.2. Sejarah Pantai Popoh	46

V. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI POPOH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

5.1. Deskripsi Hasil Penelitian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Pantai Popoh Di Kabupaten Tulungagung	49
5.1.1 Komunikasi	50
5.1.2 Sumber Daya	61
5.1.3 Disposisi	73
5.1.4 Struktur Birokrasi	75

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

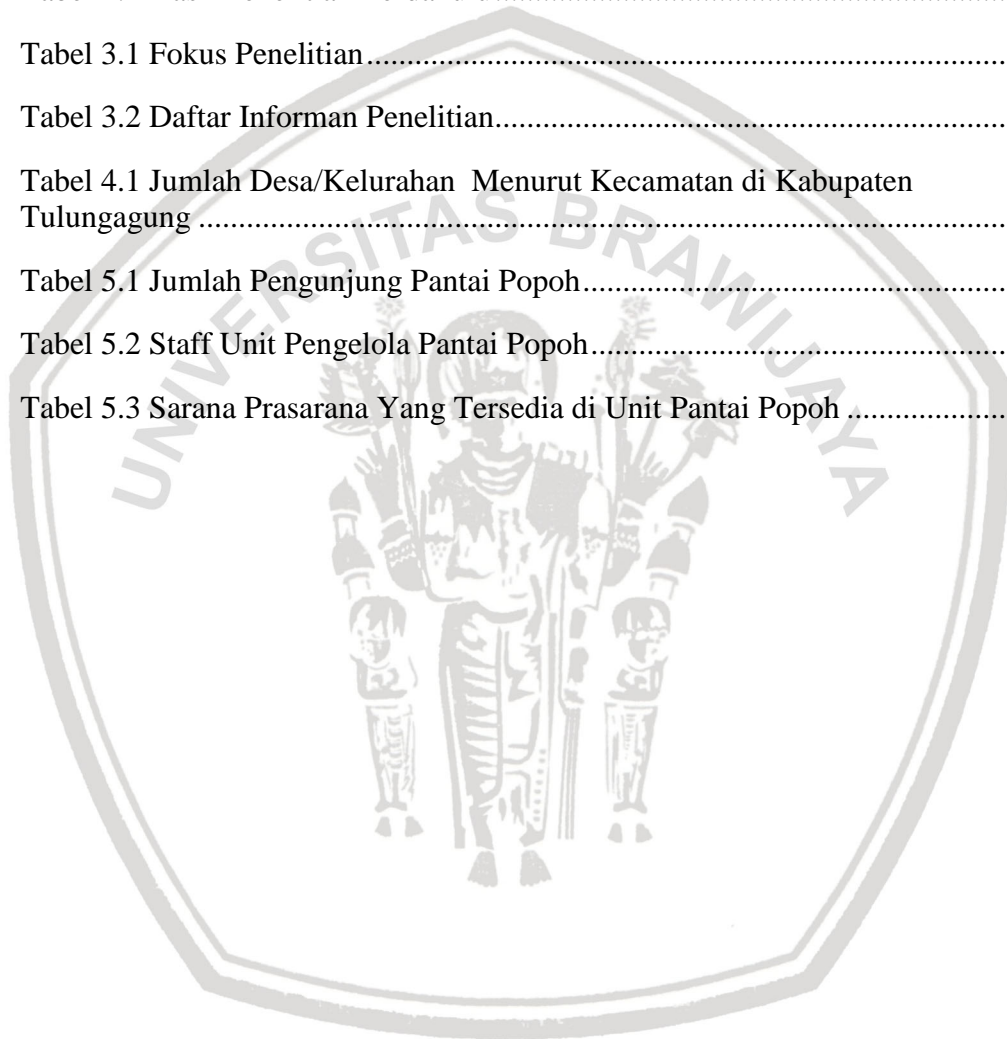
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Tempat Wisata Pantai di Kabupaten Tulungagung	4
Tabel 1.2 Data Pendapatan Sektor Pantai Popoh dan PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2015	20
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	33
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	44
Tabel 5.1 Jumlah Pengunjung Pantai Popoh	59
Tabel 5.2 Staff Unit Pengelola Pantai Popoh	62
Tabel 5.3 Sarana Prasarana Yang Tersedia di Unit Pantai Popoh	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Kondisi Jalan Yang Berlubang di Area Masuk Pantai Popoh.....	70
Gambar 5.2 Plakat (Penunjuk Jalan) di Area Pantai Popoh	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh potensi andalan dan unggulan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pengembangan diharapkan memiliki manfaat yang besar bagi suatu daerah.

Pembangunan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf dan mutu tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kebutuhan akan rekreasi. Salah satu bentuk kebutuhan akan rekreasi dapat disalurkan dengan berwisata atau melakukan kunjungan ke berbagai obyek wisata.

Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.¹

Adanya otonomi daerah, secara formal terjadi pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota sebagai unit

¹ Chafid Fandeli, *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 24

otonomi untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk didalamnya sektor pariwisata. Hal ini merupakan stimulus dan kesempatan bagi daerah untuk mengelola pariwisata dengan optimal sebagai sektor yang berpeluang menjadi sektor unggulan sehingga dapat tercipta kemandirian daerah.

Pengelolaan pariwisata tentu saja akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Suatu tempat wisata tentu memiliki dampak-dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Pengelolaan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif kepada masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial.

Pengelolaan pariwisata akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi. Upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati. Pengelolaan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi sangat relevan jika pengelolaan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerahnya. Diharapkan pengelolaan pariwisata dapat berpengaruh baik bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat lokal dan mampu mendorong pengembangan berbagai sektor lain baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Dengan demikian maka, pengelolaan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara

ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah – wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi ke kota – kota besar dapat lebih ditekankan. Hal ini disebabkan pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis, aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya. Keberadaan sektor pariwisata tersebut seharusnya memperoleh dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat yang berada di lokasi objek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang.

Pantai dengan segala daya tariknya, menjadikan motor penggerak bagi wisata alam, khususnya yang berbasis pada potensi wisata pantai. Pemanfaatan pantai sebagai tempat pengembangan pariwisata tentu berakibat pada semakin

beratnya beban yang harus didukung oleh lingkungan. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung sendiri juga terdapat wisata pantai unggulan yang menjadi salah satu aset berharga Kabupaten dalam sektor pariwisata atau pantai pada khususnya yaitu pantai Popoh. Pantai Popoh terletak di Desa Besuki, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Letaknya sekitar 30 Km dari arah selatan Kabupaten Tulungagung. Kawasan pariwisata pantai Popoh merupakan obyek wisata alam yang sangat indah, sehingga sangat diminati oleh wisatawan mancanegara maupun oleh wisatawan dalam negeri. Selain itu dari segi budaya, Pantai Popoh mempunyai beberapa keunggulan seperti banyak wisatawan yang beranggapan mengenai keberadaan Ratu Pantai Laut Selatan dan juga beberapa acara keagamaan hindu di pantai tersebut.

Akan tetapi pembangunan di Pantai Popoh saat ini seperti jalan di tempat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurang giatnya pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga tergerusnya Pantai Popoh oleh tempat wisata lain di Kabupaten Tulungagung. Sebagai perbandingan saat ini terdapat hampir lebih 43 tempat wisata pantai di Kabupaten Tulungagung. Berikut daftar 43 tempat wisata pantai di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 1.1

Daftar Tempat Wisata Pantai di Kabupaten Tulungagung

No	Nama Pantai
1	Pantai Kedung Tumpang
2	Pantai Popoh
3	Pantai Coro
4	Pantai Sine
5	Pantai Molang
6	Pantai Pathok Gebang

7	Pantai Lumbung
8	Pantai Sanggar
9	Pantai Klatak
10	Pantai Ngalur
11	Pantai Brumbun
12	Pantai Sidem
13	Pantai Tebing Banyu Mulok
14	Pantai Pacar
15	Pantai Gerangan
16	Pantai Dlodo
17	Pantai Ngapurancang
18	Pantai Semrawang
19	Pantai Sioro
20	Pantai Gemah
21	Pantai Dadap
22	Pantai Godeg
23	Pantai Gladak
24	Pantai Nglarap
25	Pantai Putih
26	Pantai Sawahan Ombo
27	Pantai Tebing Pancing
28	Pantai Tebing Ombak Dor
29	Pantai Wedi Ireng
30	Pantai Wedi Ciut
31	Pantai Sambung
32	Pantai Ngepor
33	Pantai Semanten
34	Pantai Branjang
35	Pantai Sinep
36	Pantai Silangkap
37	Pantai Blabak
38	Pantai Segoro Alas
39	Pantai Pereng Waru
40	Pantai Kalipucung
41	Pantai Jung Pakis
42	Pantai Tebing W
43	Pantai Tebing Omben Banteng

Sumber : Dinas Pariwisata Tahun 2018

Dengan banyaknya tempat wisata pantai tersebut, mengindikasikan beberapa kerugian dan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh misalnya dengan banyaknya tempat wisata pantai, otomatis dapat meningkatkan PAD secara keseluruhan. Sebaliknya kerugian yang diperoleh dengan banyaknya tempat wisata yang tersebar di berbagai wilayah dapat menjadikan semakin tergerusnya beberapa tempat wisata karena mengalami kurang siapnya menghadapi perubahan maupun persaingan. Hal ini juga terjadi di Pantai Popoh yang juga harus mengalami persaingan maupun perubahan zaman.

Untuk dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang berbentuk pariwisata seringkali setiap pemerintah daerah merubah kebijakan maupun peraturan daerah tersebut. Kebijakan maupun peraturan daerah yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* atau pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan itu pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku para birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran, hal ini membuat proses implementasi sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan publik yang diciptakan.

Posisi sektor pariwisata Kabupaten Tulungagung sangat penting sebagai salah satu bisnis inti Kabupaten Tulungagung. Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis inti, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Keunggulan sektor pariwisata dalam konteks regional Jawa Timur ditunjukkan pula dengan posisi sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, beberapa wilayah lainnya belum menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun merupakan salah satu sumber pendapatan walaupun kontribusinya masih kecil.

Tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Tulungagung adalah menjadikan pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi serta sumber pendapatan daerah. Tujuan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat memacu perkembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Pariwisata di Kabupaten Tulungagung sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi daerah, walaupun sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1.2
Data pendapatan sektor pantai popoh dan PAD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Unit Rekreasi Pantai Popoh	PAD	Kontribusi
2011	446.171.430	124.953.420.814	0,35
2012	483.306.500	162.162.000.000	0,30
2013	557.689.300	174.981.706.538	0,31
2014	684.079.500	275.699.854.433	0,25
2015	1.056.942.000	309.646.329.185	0,34

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumbangan pendapatan dari sektor pantai popoh terhadap PAD terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, sumbangan sektor pantai popoh terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 1.056.942.

Dengan adanya potensi wisata Pantai Popoh tersebut maka pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan bukti nyata dengan diwujudkan program-program atau upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata serta merangsang masyarakat untuk membuka usaha yang mendukung pariwisata, guna memenuhi kebutuhan perjalanan dan persinggahan di Pantai Popoh..

Berdasarkan pada kenyataan uraian diatas terlihat bahwa pengelolaan destinasi wisata di sektor pantai popoh mendapat tantangan yang kompleks terutama dalam hal pengelolaan terhadap pemerintah daerah yang belum maksimal sehingga peneliti tertarik untuk mencoba mengambil judul **“Pengelolaan Pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan adalah bagaimana kebijakan sektor pariwisata Pantai Popoh yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis, berikut adalah manfaat akademis dan manfaat praktis dalam penelitian :

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Mendapatkan pemahaman terkait kebijakan yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian lapangan.
- b. Memahami permasalahan atau hambatan terhadap pengelolaan destinasi wisata pantai popoh.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Pihak pemerintah serta badan pengelola pantai popoh mengetahui bagaimana pengelolaan sektor pantai popoh saat ini.

- b. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
1	Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai Dan Perikanan Di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (Rahmawati, 2013)	Kualitatif Deskriptif	Ekologi Ekonomi	Kunjungan wisatawan di kawasan Srau dan Watukarung masih belum melampaui daya dukung.	Teori yang digunakan serta lokasi penelitian
2	Potensi Wisata Alam Pantai Bahari (Hani S.)	Kualitatif Deskriptif	Analisis SWOT	Pola hidup masyarakat pesisir sangat tergantung wisata bahari, oleh sebab itu harus dibuat sarana dan prasarana yang memadai	Teori yang saya gunakan berbeda
3	Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen (Andi	Kualitatif Deskriptif	Analisis SWOT	Di wilayah Kebumen, sarana transportasi menjadi tolak	Teori dan lokasi penelitian yang berbeda

	Handoko, 2004)			ukur kesuksesan pengelolaan pariwisata	
4	Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kab. Tulungagung (Arif Wahyu Isnaini, 2014)	Kuantitatif Deskriptif	Metode Regresi Berganda	Sektor pariwisata Tulungagung menyumbang PAD yang signifikan. Sektor pantai salah satu sektor unggulan	Metode yang digunakan
5	Analisis Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang (Hidri Suhamdani, 2013)	Kualitatif Deskriptif	Konsep Pariwisata	Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Enrekang belum terprogram secara baik dan terstruktur	Metode yang digunakan dan lokasi penelitian
6	Strategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe (Patris Gisau Biduan, 2015)	Kualitatif Deskriptif	Analisis SWOT	Pengelolaan pariwisata mengalami hambatan namun dari PAD mengalami peningkatan	Lokasi penelitian

7	Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan (Joko Santoso)	Kualitatif Deskriptif	Analisis 4 A (Atraksi. Aksesibilitas, Amenitas, Aktifitas)	Adanya kendala pengembangan seperti : kurangnya sarana, terbatasnya dana, maupun kendala SDM	Lokasi penelitian dan teori yang digunakan
---	---	-----------------------	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2018)

Pertama, penelitian yang berjudul “Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)” yang ditulis oleh Ani Rahmawati, mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ani Rahmawati menulis tentang potensi sumber daya yang ada di kawasan pantai, khususnya pantai Teleng Ria yang apabila pengelolaannya bisa optimal dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Namun, Ani melihat potensi tersebut hanya difokuskan kepada aspek ekonomi dan tidak memperhatikan aspek-aspek ekologis, padahal jika aspek ekologis juga diperhatikan maka pendapatan akan lebih optimal. Karena itu, Ani melakukan penelitian terhadap aspek fisik dan ekologis serta mengusulkan konsep pengelolaan perikanan di kawasan pesisir yang terintegrasi.

Kedua, penelitian yang berjudul “Potensi Wisata Alam Pantai-Bahari” yang ditulis oleh Hani S. Handayawati, Budiono, dan Soemarno yang mengemukakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap wisata alam terutama di kawasan pesisir yang mengandalkan wisata bahari telah menjadikan pergeseran pola hidup masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, serta kebutuhan

akan sarana prasarana yang ada di lokasi wisata. Oleh karena itu, untuk mendukung daya jual objek wisata terhadap para wisatawan selain menampilkan keindahan alami objek wisata bahari, perlu dibuat rekayasa sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Ketiga, Andi Handoko (2004) Penelitian dilakukan di daerah pesisir selatan Kabupaten Kebumen dengan judul *Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi pantai yang belum berkembang di daerah penelitian dan pengaruh sarana jalan terhadap tingkat potensi obyek pantai. Analisa yang digunakan yaitu analisis data primer dan data sekunder, dengan klasifikasi potensi internal dan eksternal. Faktor ketersediaan sarana transportasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan obyek wisata pantai di Kabupaten Kebumen.

Keempat, penelitian berjudul “Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung ” yang ditulis oleh Arif Wahyu Isnaini yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Wahyu Isnaini tersebut dijelaskan bahwa peningkatan atau maupun pengembangan obyek wisata dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung, jadi semakin banyak jumlah obyek wisata yang dikembangkan dan dikelola dengan baik maka akan memberikan tambahan penerimaan daerah di sektor pariwisata khususnya yang dalam hal ini pendapatan asli daerah. Penerimaan daerah yang dimaksud dapat berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Dari hasil penelitian Arif

Wahyu Isnaini tersebut juga menjelaskan sektor pantai juga merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Tulungagung di dalam meningkatkan PAD.

Kelima, penelitian berjudul “Analisis Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enkerang” yang ditulis oleh Hidri Suhamdani, mahasiswa dari Universitas Hasanudin Makasar yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Faktor pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam Lewaja Kabupaten Enrekang yang paling utama dimana daya tarik wisata alam lewaja yang mampu menyuguhkan pemandangan air terjun yang begitu alami dan jernih dan sarana kolam renang yang dikelilingi oleh pepohonan dan bukit dengan suasana alam terbuka dan kesadaran masyarakat yang mampu bekerjasama dengan pihak pengelola dalam hal kebersihan di sekitar area permandian.

Keenam, penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe” yang ditulis oleh Patris Gisau Biduan. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan dalam rangka pemantapan ekonomi daerah yang disesuaikan dalam Visi dan Misi Daerah. Prioritas pengelolaan pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Wisata Bahari dengan icon pariwisata Gunung Api Bawah Laut yang mengikuti karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan yang didukung dengan alokasi anggaran pengembangan pariwisata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

namun dengan memperhatikan hambatan tersebut adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi belum berjalan dengan optimal, Masih ada beberapa kendala yang perlu dicarikan solusi, guna pengembangan pariwisata daerah ke depan yang lebih baik. Namun perlu diakui bahwa dengan penerapan strategi tersebut, setidaknya sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meskipun hanya dalam jumlah yang kecil.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan” yang ditulis oleh Joko Santoso. Pada penelitian tersebut beracuan pada 4a (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Aktifitas) yang menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana minimnya sarana prasarana yang terdapat di lokasi Obyek Wisata Pantai Klayar. Untuk itulah perlu adanya upaya pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di lokasi Obyek Wisata Pantai Klayar yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar, pihak pemerintah serta pihak swasta.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu keputusan pemerintah yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama. Banyak teori yang berkembang mengenai definisi-definisi kebijakan publik. Diantaranya menurut Thomas R. Dye, kebijakan public adalah *is whatever government choose to do or not to do* yang artinya

bagaimana kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹

Dari definisi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dalam pengelolaan dapat mengacu pada suatu pedoman yang mempunyai kekuatan hukum..

Kepemerintahan yang baik harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi, yaitu partisipasi, kekuasaan hukum (*rule of law*), transparansi, ketanggapan (*responsiveness*), orientasi consensus, kesetaraan (*equity*), hasil guna dan daya guna (*effectiveness and efficiency*), ketanggungan (*accountability*), dan visi strategis. Perubahan pokok yang berkenaan dengan makna “kebijakan publik” adalah berkembangnya “kebijakan publik” dari sekedar “pemerintah” (atau eksekutif) menjadi “negara” (*state*), menjadi aktor-aktor yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara, yang berarti menyangkut sektor masyarakat.

¹ Solichin Abdul W, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UMM Press, 2011), hal. 4.

Dari sini bisa dipahami bahwa, sebuah “negara” dalam arti luas terdiri dari dua kelompok organisasi, yaitu “negara” (*state*) dan masyarakat (*society*). Dalam konteks ini pemilahan yang banyak digunakan oleh praktisi dan pembelajar administrasi Negara, bahwa pembagiannya adalah: Negara (*state*), masyarakat (*society*), dan swasta (*private*).²

2.3. Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan tidak begitu saja ada, namun melalui proses atau tahapan. Menurut William Dunn (2000) membagi siklus pembuatan kebijakan menjadi lima tahap, yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain tetap menjadi fokus, sedangkan ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terkait.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

² Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 14-15.

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsumen antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

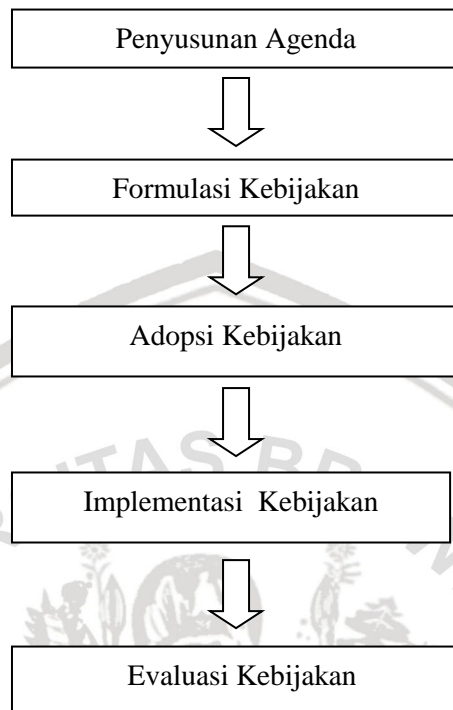
Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa hal yang lain akan ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini sebuah kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.³

³ *Ibid.*, hal. 109.

Bagan 2.1
Bagan Pembuatan Kebijakan Menurut William N. Dunn



Sumber: *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: William N. Dunn (1994)*

Pada penelitian ini, penulis lebih terfokus pada tahap implementasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui proses pengimplementasian dalam mencapai tujuan dan target yang ditentukan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan agar para implementor, stakeholder, dan target sasaran mampu memahami dan menerima kebijakan ini. Selanjutnya penulis akan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dengan model implementasi kebijakan Edward III yang dianggap paling sesuai untuk digunakan membedah secara mendalam terhadap strategi pengembangan Pantai Popoh.

2.4. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan George C. Edward III mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor yang dimaksud antara lain meliputi :

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Hal ini terkait dengan aktivitas para pelaksana kebijakan, tentang apa yang menjadi standar dan tujuan secara konsisten / seragam dari berbagai informasi. Dalam bukunya Edward III menjelaskan bahwa :

“Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka proses implementasi akan menimbulkan berbagai kendala di lapangan walau isi kebijakan tersebut di nilai sangat baik.”

Pendapat diatas menjelaskan masalah-masalah dapat timbul karena struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan objek objek kebijakan. Situasi demikian terjadi apabila objek kebijakan tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban yang mesti harus dipenuhi. Dalam Kategori komunikasi terdiri dari beberapa sub komponen seperti :

- a) Transmisi (*Transmission*) yang merupakan penyampaian atau sosialisasi sebuah isi kebijakan antara pelaksana kebijakan dan penerima program kebijakan.
- b) Kejelasan Persoalan (*Clarity*) hal ini tidak hanya menyangkut bagaimana kecakapan badan pelaksana kebijakan memahami isi sebuah kebijakan, tetapi juga bagaimana sikap antisipasi jika pelaksanaan sebuah kebijakan mendapat permasalahan dari publik yang menjadi target kebijakan.
- c) Konsistensi (*Consistency*) merupakan kemantapan badan pelaksana sebuah kebijakan dalam menentukan arah kebijakan tanpa sikap ambigu atau *plin plan*, apabila setiap personal atau kelompok memiliki pemahaman yang berbeda dalam menjalankan sebuah kebijakan maka akan sulit untuk meyakinkan penerima kebijakan.

2. Sumberdaya (*Resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a) Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas. Apabila staf untuk mengimpletasikan sebuah kebijakan hanya melibatkan segelintir pejabat pemerintah tanpa

- b) melibatkan kelompok atau individu dalam masyarakat maka sebuah kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Yang sangat dibutuhkan adalah staf yang dapat saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
- c) Informasi yang merupakan kecakapan suatu unit pelaksana kebijakan dalam mengetahui perkembangan dilapangan, apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan dan bagaimana proses penyampaian informasi tersebut dari atasan ke bawahan agar informasi yang diterima dapat dipahami sesuai dengan pengamatan.
- d) Kewenangan (*Authority*) merupakan pengembangan sumber daya untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang di implementasikan adalah sesuai dengan yang masyarakat kehendaki. Namun, kadang kala kewenangan tersebut sering terhalang – halangi karena suatu kebijakan di pandang tidak aspiratif hanya kemauan sekelompok orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Kewenangan untuk menjalankan sebuah kebijakan tidak selalu bisa dipaksakan hal ini bergantung pada seberapa besar tekanan untuk mendukung atau menolak sebuah kebijakan baik itu masyarakat maupun intervensi lembaga, atau media massa.
- e) Fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan

tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

3. Disposisi (*Dispotition*)

Disposisi ini diartikan sebagai watak atau sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai ke sepakatan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk sesuai dengan tujuan dan standar kebijakan.

Rintangan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan yang ditimbulkan oleh disposisi datang dari bentuk struktur birokrasi dan sumber daya yang ada di dalamnya, dimana setiap individu yang ikut dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan memiliki pemahaman dan penilaian yang berbeda untuk menginpertasikan tindakannya, sering sekali para aktor implementasi tersebut kurang dapat bekerja sama karena lebih mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan yang sudah terumuskan dalam standar tujuan sebuah kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Struktur birokrasi pada organisasi yang mengimplementasi

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi menurut Edward III adalah:

- a) Prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOPs*) yang merupakan pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Sebuah kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas pada setiap programnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Kegagalan bisa saja kita temukan dalam pelaksanaan kebijakan jika standar dan tujuannya tidak dipahami, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain supaya suatu program berhasil dilaksanakan.
- b) Fragmentasi (*Fragmentation*) yang merupakan suatu mekanisme pembagian atau penyebaran tanggung jawab untuk wilayah kebijakan antar unit organisasi. Secara umum, semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan suatu kebijakan, semakin kecil kecil peluang untuk berhasil karena banyaknya para agen yang mengimplementasikan sebuah kebijakan memiliki sikap yang berbeda sehingga apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan sering ditentang

oleh agen lainnya. Pemerintah harus menghabiskan banyak waktu dan sumberdaya untuk bernegosiasi satu sama lain karena unsur yang terlibat memiliki prinsip yang berbeda sehingga hasil yang ditetapkan cenderung berpihak pada kekuasaan dan bagian yang mendominasi di dalamnya.

2.5. Konsep Daerah Pesisir

Daerah pesisir menurut Masyudzulhak adalah pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, ke arah darat sampai pada daerah masih adanya pengaruh perembesan air laut dan angin laut, dan ke arah laut sampai pada daerah masih ada pengaruh air tawar dan memiliki beragam sumberdaya yang pulih maupun tidak pulih. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas manusia bersosialisasi, yaitu pemerintahan, sosial-eko ekonomi-budaya-pertahanan keamanan.⁴

2.6. Konsep Pengembangan Daerah Pesisir

Perspektif pengelolaan wilayah pesisir dapat didasarkan kepada otonomi daerah bagi pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dapat menumbuhkembangkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Menurut UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4 memberikan wewenang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten. Provinsi diberi wewenang mengelola sejauh 12 mil mil laut, sementara kota serta kabupaten diberi wewenang 1/3 dari wilayah provinsi. Daerah-daerah yang

⁴ Apridar et al, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.331.

memiliki wilayah pesisir dapat menggali potensi sebagai salah satu sentra produksi baru dalam mendorong pembangunan.⁵

Lebih lanjut Masyhudzulhak menyatakan bahwa perspektif otonomi daerah dapat menjadi *guideline* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dengan tujuan

- (i) Secara ekologis haruslah dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir
- (ii) Secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas produktivitas sumberdaya pesisir,
- (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan
- (iv) Secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta penguatan kelembagaan
- (v) Dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai garda terdepan dalam mewaspadaikan potensi-potensi yang akan mengganggu kepentingan dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 332.

kemanan baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan.⁶

2.7 Konsep Pariwisata

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 333.

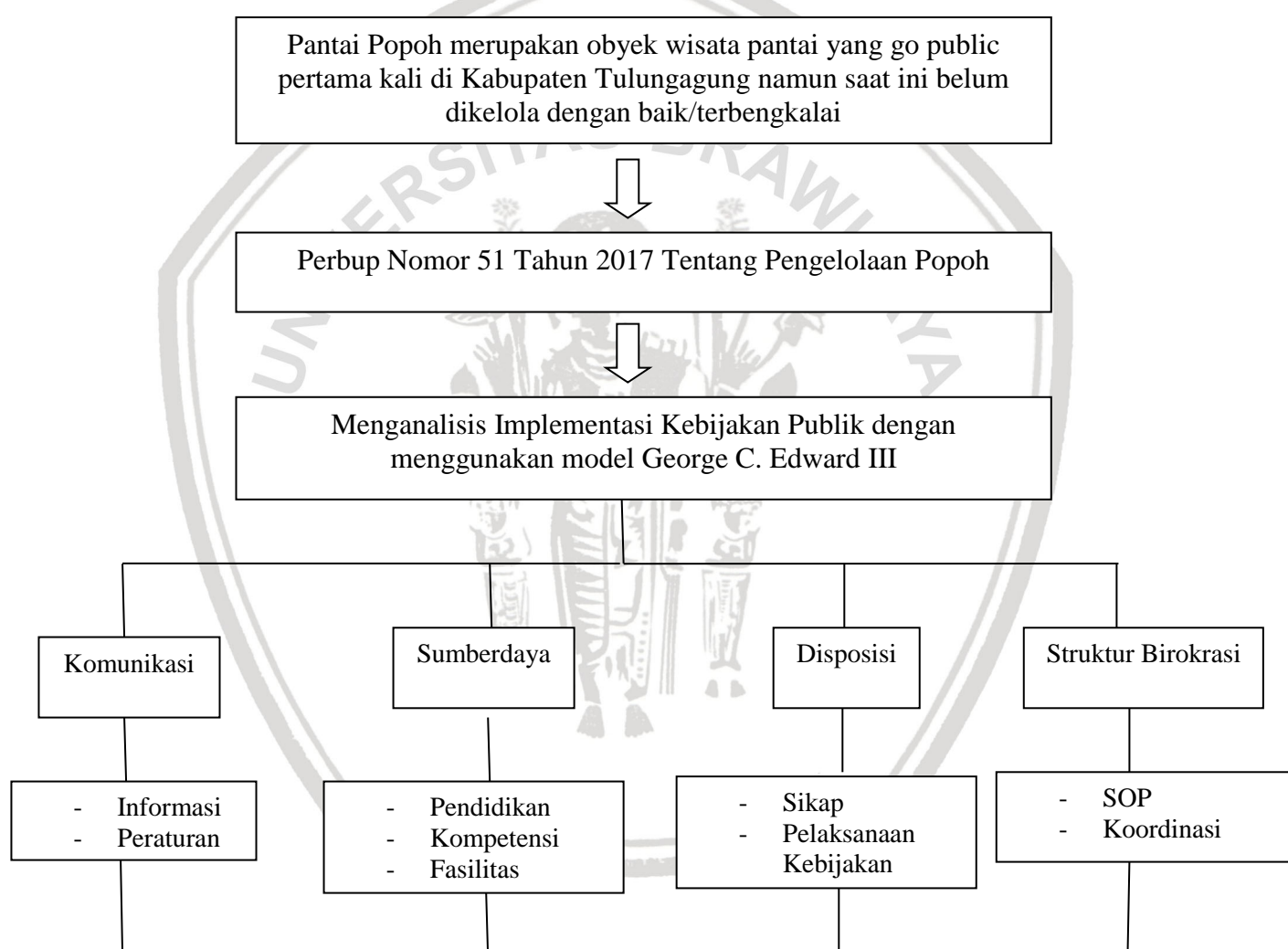
⁷ Gamal Suwanto., *Op.Cit.*, hlm. 3.

2.8. Kerangka Penelitian

Apabila digambarkan, maka gambar kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2.2

Kerangka Penelitian



Sumber : Olahan Peneliti (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat dibutuhkan ketika akan melakukan suatu penelitian untuk mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pelaksanaan sebagai hasil untuk menyusun skripsi. Metode tersebut meliputi :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Apa yang diungkapkan oleh Sugiyono maka metode penelitian kualitatif meneliti pada obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.²

Selanjutnya menurut Bogdan Taylor yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹Sugiyono. 2009. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta, Hlm. 1

²*Ibid.* Hlm. 2

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh.³ Sedangkan Kirk dan Miller mengatakan bahwa secara fundamental penelitian kualitatif bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.⁴

Pemakaian pendekatan kualitatif disebabkan karena peneliti adalah instrumen utama yang akan mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang akan menjadi objek penelitian, dan hal ini menurut peneliti sesuai untuk memahami makna dan realitas dari dampak kebijakan tersebut dengan mendeskripsikan fakta dan kondisi yang sedang berkembang. Dari penjelasan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi kajian yang diamati sebagaimana adanya. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu objek peristiwa pada masa sekarang

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif adalah suatu jenis penelitian untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang dihadapi pihak atau instansi yang terkait

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.3

⁴ *Ibid.*,

dengan Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung.. Penggunaan penelitian yang bersifat deskriptif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan secara cermat ke dalam skripsi mengenai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi penelitian. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa fokus masalah pada penelitian ini adalah pada bagian Pengelolaan Sektor Pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung. Tahun 2017.

Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.. Kemudian pengelolaan sumber daya tersebut dikaitkan dengan konsep model implementasi George C. Edward III yang mengacu pada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut merupakan matriks fokus penelitian :

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

Fokus	Aspek	Sub Penelitian
Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung	Komunikasi	a) Sebagai upaya memberikan/menyalurkan informasi yang jelas, akurat dan konsisten kepada obyek kebijakan b) Sebagai petunjuk pelaksana peraturan
	Sumber daya	a) Tingkat pendidikan pelaksana pendidikan b) Tingkat pemahaman petugas pelaksana kebijakan terhadap program kebijakan c) Fasilitas untuk menunjang program kebijakan
	Disposisi	a) Sikap pelaksana terhadap peraturan
	Struktur Birokrasi	a) Penyesuaian prosedur kerja dalam pelaksana kebijakan b) Koordinasi antar pelaksana kebijakan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018)

3.3 Jenis dan sumber Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data merupakan keterangan atau bahan nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan)⁵. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif sebagai metode untuk mencari data. Sumber data terbagi sebagai berikut.

⁵<http://kbbi.web.id/data> diunduh pada tanggal 25 April 2016 pukul 21.00

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, informan kunci terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
2. Kepala Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
3. Kasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Disbudparpora Kabupaten Tulungagung.
4. Kasi Usaha Jasa Pariwisata
5. Kasi Usaha Sarana Pariwisata
6. Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung
7. PT Bina Samudra
8. Staff Pantai Popoh

⁶Sugiyono. 2009. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta, Hlm. 62

9. Masyarakat sekitar Pantai Popoh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh peneliti sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa peneliti sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepada pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.⁷. Jadi, data sekunder bisa didapatkan melalui data di Dinas terkait berupa dokumen resmi milik dinas. Bahkan bisa didapatkan melalui surat kabar, dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif pasti memerlukan teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Wawancara

Wawancara memang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian sebagaimana kejadian nyata dilapangan sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan interview atau

⁷ Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran: Plus 36 Topik Riset Pemasaran Siap Terap, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 38

wawancara “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” dalam terjemahannya wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸ Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁹

Wawancara juga memiliki jenis, menurut Esteborg dalam Sugiyono diantaranya, *Pertama*, Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dengan cara menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, *Kedua*, Wawancara semistruktur yaitu pelaksanaan wawancara lebih bebas untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang wawancari diminta pendapat dan ide-idenya, *Ketiga*, Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.¹⁰

Dari ketiga jenis wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yakni dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis guna

⁸*Ibid.* Hlm. 72

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.* Hlm. 73-75

mendapatkan data penelitian sesuai apa yang telah dipersiapkan oleh peneliti.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian juga sangat dibutuhkan guna memperkuat data yang akan disusun oleh penulis sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.¹¹ Sedangkan menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹² Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Mendokumentasikan suatu penelitian agar bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul dapat diproduksi dan sebagai bahan referensi penulis dalam menyusun penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan *key information* (informan kunci) menurut Sugiyono yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian.¹³ Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling* menurut Sugiyono, teknik pengambilan sampel sumber data dengan

¹¹<http://kbbi.web.id/dokumentasi> diunduh pada tanggal 26 April 2016 pada pukul 21.00

¹²Sugiyono. 2009. “Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung: Alfabeta, Hlm. 82

¹³*Ibid.* Hlm. 101

pertimbangan tertentu.¹⁴ Disamping itu peneliti juga menggunakan *snowball sampling* menurut Sugiyono, teknik mengambil sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.¹⁵

Di dalam penelitian ini akan dilakukan interview pada beberapa informan kunci yakni:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
2. Kepala Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung
3. Kasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Disbudparpora Kabupaten Tulungagung
4. Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung
5. PT Bina Samudra
6. Masyarakat sekitar Pantai Popoh.
7. Pengunjung/wisatawan.

¹⁴*Ibid.* Hlm. 300

¹⁵*Ibid.*

Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Eddith Sadewo	Penanggung Jawab Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)
2	Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.si	Kasi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata
3	Misbahul Munir, S.Sos	Kasi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata
4	RR Sri Joeniastoeti, SE	Kasi Usaha Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata
5	Hadi Purwanto	Guide/Staff Pantai Popoh/Masyarakat lokal
6	Pita Mustikasari	Guide/Staff Pantai Popoh
7	Bapak Slamet	Staf Tempat Pelelangan Ikan Pantai Popoh/Pegawai Dinas Perikanan
8	Bapak Agus	Wisatawan
9	Bapak Ali	Wisatawan
10	Ibu Khotimah	Pedagang/Masyarakat lokal
11	Trisna	Wisatawan
12	Bapak Anton	Staff PT Bina Samudra

Sumber: *Olahan Peneliti (2018)*

Alasan peneliti memilih informan diatas, karena informan terlibat langsung dan mengetahui pengembangan pantai popoh serta data-data mengenai operasional pantai popoh namun juga perlu pertimbangan tertentu. Untuk mendapatkan data yang akurat dipilih menggunakan *teknik snowball sampling* yaitu teknik mengambil sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Dengan maksud sampel yang tadinya sedikit menjadi banyak.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, mnyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁷ Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

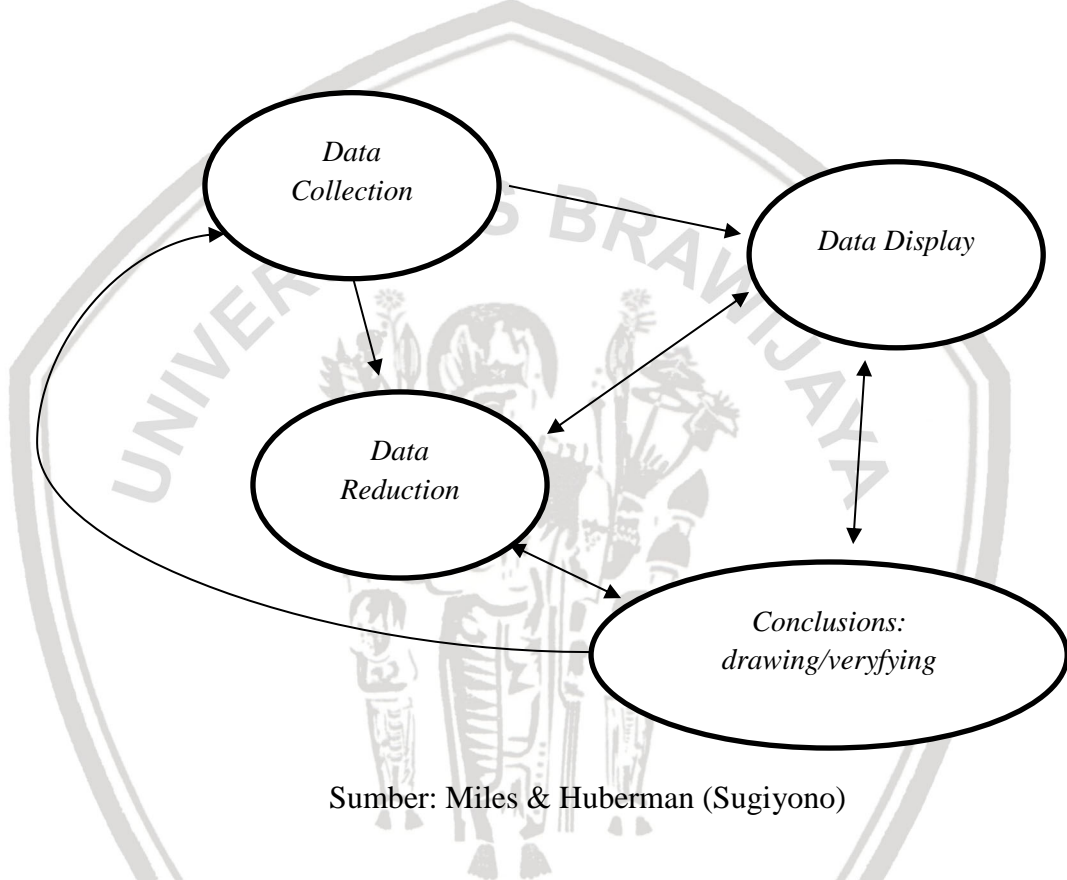
¹⁶*Ibid.* Hlm. 89

¹⁷*Ibid.*

Berikut ini adalah model analisis data kualitatif secara interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono¹⁸:

Bagan 3.1

Analisis Data



Keterangan:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

¹⁸*Ibid.* 91-99

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narratif text*” dalam terjemahannya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif¹⁹.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 95

BAB IV

GAMBARAN UMUM PANTAI POPOH DI KABUPATEN

TULUNGAGUNG TAHUN 2017

4.1 Keadaan Umum Wilayah

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada $7^{\circ}51' - 8^{\circ}18'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}43' - 112^{\circ}07'$ Bujur Timur. Jarak antara Ibukota Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Tulungagung) dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya. Sementara jarak antara Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Tulungagung berkisar antara 0-36 km, dimana Kecamatan Pucanglaban merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten.

4.1.2 Administrasi Wilayah

Kabupaten Tulungagung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibukotanya adalah Tulungagung. Adapun batas administrasinya adalah :

- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sedangkan Pantai Popoh terletak di sebelah selatan Kota Tulungagung, tepatnya di Desa Besole, Kecamatan Besuki yang memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Pakel
- Sebelah Timur : Kabupaten Campurdarat dan Tanggunggunung
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

4.1.3 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung 1.055,65 km² terbagi menjadi 19 kecamatan 14 kelurahan dan 257 desa atau seperti tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Besuki	10
2	Bandung	18
3	Pakel	19
4	Campurdarat	9
5	Tanggunggunung	7
6	Kalidawir	17
7	Pucanglaban	9
8	Rejotangan	16
9	Ngunut	18
10	Sumbergempol	17
11	Boyolangu	17
12	Tulungagung	-
13	Kedungwaru	19
14	Ngantru	13
15	Karangrejo	13
16	Kauman	13
17	Gondang	20
18	Pagerwojo	11
19	Sendang	11
TOTAL		257

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

4.1.4 Kondisi Topografi

a. Fisiografi

Kabupaten Tulungagung memiliki fisiografi lahan dari dataran rendah, sedang hingga dataran tinggi dengan konfi gurasi datar hingga perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa, untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak enam desa dan Kecamatan Sendang sebanyak lima desa.

Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan pagerwojo sebanyak satu desa dan Kecamatan Sendang sebanyak dua desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu :

- Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis, mencakup areal seluas $\pm 25\%$;
- Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur, mencakup areal seluas $\pm 40\%$,

- Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas $\pm 35\%$

b. Relief (Ketinggian Tanah)

Berdasarkan ketinggian tempat dari atas permukaan laut (dpl), wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl, meliputi wilayah seluas 38.527,23 Ha atau mencakup 36,76% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 m dpl, meliputi wilayah seluas 64.215,89 Ha atau mencakup 55,82% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 500-1.000 m dpl, meliputi wilayah seluas 9.479,38 Ha atau mencakup 7,67% dari keseluruhan luas.
- Wilayah dengan ketinggian 1.000 m dpl, meliputi wilayah seluas 3.474,24 Ha atau mencakup 3,02% dari keseluruhan luas.
-

4.2 Sejarah Pantai Popoh

Pantai popoh merupakan wisata bahari paling ikonik di wilayah kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Letak geografisnya yang berada di teluk Popoh, pesisir laut Jawa selatan. Jarak tempuh kira-kira 30 km dari pusat kota Tulungagung serta didukung infrastruktur yang tersedia, membuat Pantai Popoh banyak dikunjungi wisatawan tidak hanya dari wilayah Kabupaten Tulungagung tetapi dari luar daerah banyak yang penasaran akan keindahannya.

Pantai Popoh memiliki gelombang yang sedang dan gugusan karang serta bebatuan di pesisir pantai pada umumnya. Pantai Popoh secara resmi bernama Pantai Indah Popoh (PIP).

Sejarah pantai popoh tidak lepas dari dari sosok Almarhum Bapak Soemiran Karsodiwirjo. Pria kelahiran asli Tulungagung yang lahir pada tanggal 9 September 1921. Merintis pengembangan Pantai Popoh dan sekitarnya pada tahun 1972 melalui PT Soetra Bina Samodra. Selain itu PT Soetra Bina Samodra juga jadi pengelolanya, hingga setelah Bapak Soemiran meninggal di tahun 1995. Beliau dimakamkan di komplek Retjo Sewu, yang termasuk dalam kawasan Pantai Popoh juga. Sepeninggal Bapak Sumiran Karsodiwirjo, PT Soetra Bina Samodra mengalami kemunduran keuangan. Perusahaan rokok PT Retjo Pentung yang jadi induk PT Soetra Bina Samodra di nyatakan pailit oleh pengadilan dan hingga kini masalah dengan mantan karyawan masih belum tuntas.

Sekarang kawasan Pantai Popoh di kelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pariwisata. Hal ini didukung dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pantai Popoh. Wisatawan yang berkunjung disuguhi pemandangan yang alami. Gugusan karang dan bebatuan di pinggir pantai menjadi tempat hidup fauna laut yang mengesankan buat wisatawan. Pihak pengelola Pantai Popoh juga menyediakan perahu motor dengan biaya sebesar 25 ribu rupiah. Wisatawan akan diajak berkeliling dan dipandu untuk melihat obyek wisata yang ada disekitar pantai.

Di area Pantai popoh terdapat pendopo yang berukuran luas, wisatawan dapat bersantai dengan nyaman di area pendopo tersebut tanpa dipungut biaya

tambahan sepersenpun. Terkadang di area pendopo terdapat pentas seni yang bertujuan untuk menghibur masyarakat sekitar serta wisatawan-wisatawan yang datang dan untuk melestarikan budaya-budaya kejawen Tulungagung. Acara-acara yang ditampilkan dalam pentas seni antara lain pagelaran wayang, jaranan, sinden, dan lain-lain.



BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI POPOH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian ini akan disajikan berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan saat penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut yakni Implementasi pengembangan pariwisata pada sektor Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung.

Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti pada tahap ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung, selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung yang dideskripsikan sebagai berikut :

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung.

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

5.1.1 Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi, Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan agenda-agenda tingkat daerah kepada masyarakat baik masyarakat umum, wisatawan, maupun pedagang. Selain agenda tingkat daerah, Pemerintah Daerah juga wajib menginformasikan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui media

elektronik, media cetak serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk suatu produk hukum daerah harus diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya.

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pengelolaan sektor pantai popoh di Kabupaten Tulungagung dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada pihak terkait maka dalam penyampaian harus benar dan tepat agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

Dimensi komunikasi dalam Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam Komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat dari komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Dimensi *transformasi* menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran yakni masyarakat dan wisatawan serta pihak terkait.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab Pantai Popoh yang menyatakan bahwa

“Bentuk komunikasi yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan sektor pantai popoh adalah dengan cara mengikutsertakan pihak –

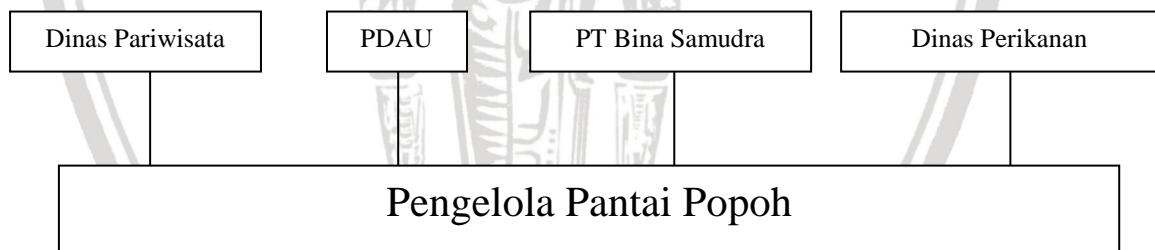
pihak terkait dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung, PT Bina Samudra dan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung dalam rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten. Hal ini dilakukan agar pihak – pihak terkait memahami perkembangan – perkembangan dan merevisi apabila terjadi kekurangan – kekurangan yang terjadi selama kegiatan pengelolaan di sektor pariwisata pantai popoh tersebut.”¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam penerapannya di sektor pengelolaan pantai Popoh harus melibatkan berbagai pihak untuk dapat turun tangan berkontribusi sesuai perannya masing-masing.

Dalam kasus ini dapat digambarkan sesuai dengan bagan berikut :

Bagan 5.1

Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Pantai Popoh



Sumber : Olahan Peneliti (2018)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pantai Popoh, dinas yang diberi amanat untuk mengelola Pantai Popoh adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Namun dinas pariwisata selaku dinas pengelola Pantai

¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Eddith Sadewo pada 19 Oktober 2016 di Kantor PDAU

Popoh harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat menunjang pariwisata yang mempunyai daya saing dengan daerah lain.

Salah satu koordinasi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung dapat ditunjukkan sesuai hasil wawancara berikut :

“Komunikasi yang dinas pariwisata lakukan diantaranya diklat masyarakat yang bertempat di Hotel Crown Victoria dan Hotel Istana serta melibatkan masyarakat. Dalam diklat yang dilaksanakan tersebut, Dinas Pariwisata melibatkan budayawan – budayawan dan juga pedagang kaki lima (PKL).”²

Transmisi dalam Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah terhadap instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Komunikasi dalam Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan dan dialog yang difasilitasi oleh Kabupaten.

Sebagai pemangku kebijakan, Dinas Pariwisata sudah melakukan tugas dan wewenang dengan semestinya. Diharapkan dengan melaksanakan diklat dapat menumbuhkan pengetahuan baru serta dapat menciptakan ruang lingkup antara pemangku kebijakan dengan masyarakat untuk dapat berinteraksi.

Selain dengan masyarakat, Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Dinas

² Hasil Wawancara dengan Bpk. Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si pada 19 Oktober 2016 di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung

terkait yang dimaksud tersebut diantaranya PDAU, PT Bina Samudra dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Joeniastoeti, SE selaku Kasi Usaha Sarana Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan :

“Dinas Pariwisata tidak berjalan sendirian, tetapi juga melakukan koordinasi dengan pihak lain. Dengan Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung melakukan koordinasi di bidang penataan lingkungan dan hasil tangkap ikan nelayan, dengan PDAU melakukan koordinasi di bidang kepegawaian popoh karena semua staff di pantai popoh merupakan pegawai di PDAU, dan dengan PT Bina Samudra melakukan koordinasi di bidang perhotelan atau penginapan ”³

Pengelolaan yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Pihak terkait juga diharapkan memahami fungsi dan wewenang apa yang harus mereka kerjakan.

Pada praktiknya di Pengelolaan Pantai Popoh, ketiga pihak terkait selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung dan PT Bina Samudra harus mengerti mengenai fungsi dan wewenang yang harus mereka kerjakan. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Slamet selaku pegawai Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan :

³ Hasil Wawancara dengan Ibu R.R. Sri Joeniastoeti, SE pada 19 Oktober 2016 di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung

“Untuk pengelolaan Pantai Popoh, Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung melakukan tugas sebagai memantau hasil tangkap ikan nelayan. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk penataan lingkungan”⁴

Dari penjelasan Bapak Slamet tersebut mengindikasikan bahwa dari pihak Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung telah memahami tugas dan wewenang mereka untuk dapat mengaplikasikannya pada pengelolaan Pantai Popoh. Hal yang sama juga dialami oleh pihak Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, seperti yang disampaikan oleh Pita Mustikasari selaku Bendahara/Staff Pantai Popoh :

“Pegawai/Staff di Pantai Popoh dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung. Sebagian pegawai/staff saya ambil dari masyarakat lokal Kecamatan Besuki. Selain karena jarak tempuh yang menjadi persoalan, juga kami pertimbangkan juga ekonomi masyarakat mereka untuk dapat kami angkat dengan adanya pariwisata Pantai Popoh ini”⁵

PT Bina Samudra selaku pihak yang berperan dalam pengelolaan Pantai Popoh juga memahami akan tugas yang harus dilakukan. Seperti pernyataan dari Bapak Anton selaku staff PT Bina Samudra sebagai berikut :

“Untuk penginapan di Pantai Popoh ini dikelola oleh PT Bina Samudra selaku pemilik lahan penginapan dan juga pengelola pertama dalam pengelolaan Pantai Popoh. Selanjutnya kami melakukan bagi hasil dengan pemerintah Kabupaten”⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet pada 31 September 2016 di Pantai Popoh

⁵ Hasil Wawancara dengan Pita Mustikasari pada 31 September 2016 di Kantor Staff Pantai Popoh

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Anton pada 31 September 2016 di Kantor PT Bina Samudra Popoh

Dilihat dari koordinasi antar dinas/pihak pemangku kebijakan telah terjalin pemahaman yang solid antara Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung dan PT Bina Samudra. Namun dari hasil penelitian yang saya lakukan, terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) dengan warga lokal dan pedagang di Pantai Popoh. Kebanyakan dari warga lokal dan pedagang di Pantai Popoh tidak mengerti akan kehadiran pemangku kebijakan di sektor pengelolaan Pantai Popoh.

Kebanyakan dari mereka tidak memahami akan keberadaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung dan PT Bina Samudra selaku pemangku kebijakan di Pantai Popoh. Seperti dalam pernyataan Ibu Khotimah selaku pedagang di Pantai Popoh yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berikut :

“Kulo mboten sumerep lek masalah niku. Kulo nggeh mboten paham menawi Popoh dikelola Dinas Pariwisata (Saya tidak tahu masalah ini. Saya juga tidak paham kalau Pantai Popoh dikelola oleh Dinas Pariwisata)”⁷

Ketidakpahaman masyarakat lokal serta pedagang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya sikap ketidakpedulian masyarakat maupun pedagang lokal akan keberadaan pemangku kebijakan di daerah sekitarnya.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Khotimah pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

b. Kejelasan

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Pada pelaksanaan Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti, maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara langsung maupun tidak langsung yaitu media cetak atau elektronik.

Pada pelaksanaan pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung, agar penyampaian informasi pelaksanaan tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, diklat, pameran, diskusi dan dialog yang selama ini dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung bahwa :

“Kejelasan penyampaian kebijakan ini sudah jelas, karena menurutnya sosialisasi yang efektif itu harus dilakukan langsung terhadap target atau objek sasaran. Selain komunikasi dengan pemangku kebijakan atau dengan dinas lain, pengelolaan harus tepat untuk memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat lokal maupun wisatawan”⁸.

Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pelaksana kebijakan dalam memahami permasalahan pengelolaan yang terjadi. Dengan adanya pemberitahuan secara langsung dalam bentuk rapat, diklat, pameran, diskusi dan dialog yang selama ini dilakukan dapat secara langsung bertanya apa yang harus dilakukan untuk dapat sesuai mencapai target.

Muara dari suksesnya pengelolaan sektor pariwisata tentunya adalah jumlah pengunjung. Apabila jumlah pengunjung dari tiap tahun meningkat tentunya pengelolaan sektor pariwisata dapat dibilang sukses. Sedangkan apabila jumlah pengunjung dari tiap tahun tidak mengalami peningkatan tentunya pengelolaan sektor pariwisata tidak mengalami peningkatan.

⁸ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung tanggal 31 September 2016

Tabel 5.1

Jumlah Pengunjung Pantai Popoh

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Prosentase Kenaikan
1	2012	116.773	
2	2013	117.382	0,5%
3	2014	119.534	1,8%
4	2015	125.057	4,6%
5	2016	128.896	3,1%
6	2017	132.273	2,6 %
Total		739.915	

Sumber : *Bendahara Pantai Popoh Tahun 2018*

Berdasarkan data dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pengunjung dari tiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah pengunjung Pantai Popoh pada saat itu mencapai 4,6 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan jalurnya dalam kategori jumlah pengunjung.

c. **Konsisten**

Dimensi konsisten menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah – ubah, maka dapat menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Konsistensi dalam Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung, dan juga Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab Pantai Popoh yang menyatakan bahwa

“Sebenarnya sudah bagus namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam penerapannya agar hasilnya maksimal dan dapat meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk dapat melihat dampak dari apa yang pengelolaan ini dilakukan”⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*). Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan berubah – ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya yang baik pula terhadap target sasaran.

⁹ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Eddith Sadewo selaku Ketua penanggung jawab pantai popoh tanggal 10 oktober 2016

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka pengelolaan kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan ini diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Sumber daya disini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil apabila tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung adalah para pegawai dari lingkup dinas dan *staff*.

Tabel 5.2
Staff Unit Pengelola Pantai Popoh

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Keterangan
1	Eddith Sadewo	T.Agung, 17 Februari 1959	SMA	Penanggung Jawab
2	Juryanto Sandi	T.Agung, 24 Juni 1970	SMP	Tenaga Harian
3	Jumali	T.Agung, 2 April 1974	SMP	Tenaga Harian
4	Warsito	T.Agung, 12 Februari 1976	SD	Tenaga Harian
5	Sutrisno	T.Agung, 28 September 1965	SMA	Tenaga Harian
6	Titin Mikawati	T.Agung, 30 September 1984	SMA	Tenaga Harian
7	Ninin Septiani	T.Agung, 30 September 1984	SMA	Tenaga Harian
8	Hadi Purwanto	T.Agung, 14 Desember 1980	SMP	Tenaga Harian
9	David Eko P	T.Agung, 19 April 1991	SMA	Tenaga Harian
10	Pita Mustikasari	T.Agung, 22 Agustus 1992	SMK	Bendahara
11	Ragil	T.Agung, 16 Januari 1989	SMA	Tenaga Harian
12	Anwar Ghozali	T.Agung, 23 Desember 1980	SMA	Tenaga Harian
13	Moch. Nuroso	T.Agung, 9 Juni 1958	SMP	Tenaga Harian
14	Sumiran	T.Agung, 15 Agustus 1951	SD	Tenaga Harian
15	Riyadi	T.Agung, 13 Mei 1956	SMP	Tenaga Harian
16	M. Chomarudin	T.Agung, 1 Juli 1985	SMP	Tenaga Harian

Sumber : *Olahan Peneliti (2018)*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah staff/pegawai di Unit pantai Popoh berjumlah 16 orang. Sementara untuk kualifikasi pendidikan sebagian besar berpendidikan SMA. Staff yang berpendidikan SMA atau setara SMK

berjumlah 8 orang memiliki persentase 50 % dari jumlah semua staff yang artinya separuh dari jumlah staff yang ada. Sedangkan SMP memiliki persentase sebesar 37,5 % dan SD sebesar 12,5 %.

Terkait sumber daya manusia (SDM) Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab mengatakan

*“Pegawai – pegawai unit popoh mempunyai etos kerja yang tinggi. Walaupun sebagian ada yang lulusan SD dan SMP mereka juga mempunyai etos kerja yang tinggi. Terkait pemilihan beberapa staff tersebut juga dipertimbangkan tempat tinggal staff dengan area popoh yang notabene merupakan daerah pesisir”.*¹⁰

Dari pengakuan Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab Pantai Popoh tersebut menjelaskan bahwa menurutnya pegawai ataupun staff di Pantai Popoh menjalankan tugas maupun fungsi dengan baik dan etos kerja yang tinggi. Namun pernyataan lain justru diungkapkan oleh Bapak Ali selaku wisatawan yang diungkapkan sebagai berikut :

*“Warga sekitar dan staff kurang menaruh perhatian yang lebih kepada lingkungan pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan yang kotor dan kurang terawat. Banyak juga masyarakat yang terkadang merusak kawasan Pantai ataupun membuat onar kepada masyarakat ataupun wisatawan, sehingga membuat pengunjung ataupun wisatawan merasa tidak nyaman.”*¹¹

Selain staff/pegawai, masyarakat lokal menjadi faktor yang tidak boleh dikesampingkan. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan pariwisata. Seperti pada pilar pariwisata bersama dengan Pemerintah serta Swasta, mereka saling berhubungan untuk dapat membentuk suatu dampak kepada pariwisata. Seperti halnya dalam kasus wisata Pantai Popoh, masyarakat

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddith Sadewo pada 19 Oktober 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan. Masyarakat diharapkan dapat memberi dampak maupun kesan kepada wisatawan. Seperti pernyataan Bapak Ali mengenai sikap masyarakat lokal kepada wisata Pantai Popoh sebagai berikut

*"Saya rasa kooperatifnya juga ada cuman terkadang sering terintervensi oleh budaya pendatang luar yang sempat bikin kacau juga kepada wisatawan. Masyarakat sini kadang merasa cuek terhadap pembangunan infrastruktur namun tetap dalam batas yang wajar"*¹²

Mengenai pengelolaan pariwisata, membentuk kesadaran pariwisata kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah. Walaupun secara sosiologis, keberadaan masyarakat lokal merupakan sebuah daya tarik sendiri bagi wisatawan, baik dengan adat istiadatnya, kreasi seninya, maupun dari sejarahnya yang sangat menarik untuk diikuti. Faktor-faktor yang dapat menjadi tolak ukur tidak mudahnya membentuk kesadaran mengenai kepada masyarakat diantaranya :

- 1) Masih ada stigma pandangan bahwa pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan yang kurang baik kepada proses pembentukan moral masyarakat. Sebagaimana dapat kita ketahui, bahwa dengan adanya pariwisata dapat terjadi proses akulturasi budaya yang dapat memberikan dampak kepadamasyarakat.
- 2) Masih ada sikap yang berlebihan kepada wisatawan baik dari segi keamanan maupun dari segi kesehatan. Sehingga sifat berlebihan yang dituju kepada wisatawan, membuat mereka kurang nyaman saat mengunjungi tempat wisata tersebut.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

- 3) Belum tumbuhnya sikap masyarakat untuk saling melindungi dan memberikan pelayanan kepada wisatawan seperti sikap murah senyum dan menyapa kepada wisatawan.
- 4) Belum terbentuknya sikap maupun cara pandang mengenai pentingnya pariwisata dapat menjanjikan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

b. Sumber Daya Non Manusia (Fasilitas atau Sarana Prasarana)

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam obyek wisata pantai popoh berupa aula, arena bermain, panggung, tempat penangkapan ikan (TPI), mushola, penginapan, dan sumber daya lainnya. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dilihat dari sumber daya non manusia yang ada di Pantai Popoh, sebetulnya banyak yang harus digali oleh pemangku kebijakan untuk dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada. Seperti pernyataan Bapak Bagus mengenai keunikan Pantai Popoh sebagai berikut :

“Yang menarik dari Popoh adalah dari sisi produksi perikanan, maksudnya dari segi penangkapan ikan yang memadai. Mungkin Popoh terkenal karena adanya Retjo Sewu. Kelebihan Popoh mungkin ada disitu ada tempat pelarungan api dibanding Pantai lain.”¹³

Pantai Popoh memang terkenal akan hasil ikannya yang sangat melimpah. Tidak jarang banyak wisatawan-wisatawan ataupun pedagang-pedagang yang ke Pantai Popoh untuk mencari hasil perikanan. Tidak hanya dari produksi perikanan saja yang menjadi primadona di Pantai Popoh ini. Ada sumberdaya-sumberdaya lain yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Pantai Popoh. Misalnya saja dari pernyataan Ibu Trisna berikut ini :

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

“Pemandangan alam disini sangat bagus, namun ada beberapa hal yang mengganggu seperti misalnya kalau dilihat dari depan, hanya loket masuk, parkirannya juga kurang tertata dengan rapi, wahana juga kurang memadai, jadi hanya mengandalkan keindahan alam saja.jadi tidak ada kesan yang diberikan kepada wisatawan seusai ke pantai.”¹⁴

Walaupun dari sisi panorama alam yang bagus, namun terdapat hal-hal yang kurang ditingkatkan dari sumber daya tersebut. Infrastruktur Pantai Popoh dinilai sangat kurang oleh berbagai wisatawan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemangku kebijakan baik itu Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, maupun dari PT Bina Samudra.

Tabel 5.3
Sarana Prasarana Yang Tersedia di Unit Pantai Popoh

No	Jenis Ruang	Jumlah
1	Aula	1
2	Arena bermain	1
3	Panggung	1
4	Tempat Penangkapan Ikan (TPI)	1
5	Mushola	1
6	Penginapan	5
7	Ruang Kantor	1
8	Kamar Mandi	2

Sumber : *Olahan Penulis (2018)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh unit pantai popoh sudah lengkap. Sementara keadaan bangunan dalam keadaan baik. Namun perlu untuk menambah beberapa sarana dan prasarana yang untuk dapat memanjakan para wisatawan. Kelengkapan sarana prasarana

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Trisna pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

dilakukan demi tercapainya kepuasan wisatawan dan juga peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eddith Sadewo selaku penganggung jawab pantai popoh yang mengatakan bahwa

“ Pihak pantai sudah melakukan perbaikan di sektor panggung dan arena bermain untuk menunjang perbaikan pantai. Selain itu tahun depan juga diperkirakan ada perbaikan di sektor lain tetapi masih didiskusikan lebih lanjut dengan PT. Bina Samudera, Perhutani, Dinas Kelautan, dan Dinas Pariwisata.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan yang baik. Oleh karena itu sarana dan prasarana harus secara tepat. Dalam hal ini pengelolaan sektor pantai popoh dapat dikatakan baik, sektor sarana prasarana dapat dipenuhi dengan koordinasi dari pihak terkait (PDAU, PT. Bina Samudera, Dinas Kelautan, dan Dinas Pariwisata).

Namun pemanfaatan lahan di Pantai Popoh ini dirasa kurang dikembangkan lebih jauh lagi. Menurut beberapa wisatawan yang berkunjung tidak ada perubahan yang signifikan di Pantai Popoh tersebut dari dulu sampai sekarang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus yang mengatakan bahwa :

“Dari pembangunan infrastruktur tidak ada perubahan, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada. Sedangkan kualitas yang ada di Pantai Popoh ini juga sama seperti dulu, hanya fasilitas disini seperti terjaga, sehingga tidak ada perubahan antara sekarang maupun dulu. Parkiran juga sama tidak ada

¹⁵ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab popoh tanggal 19 Oktober 2016

perubahan besra. Tapi kalau soal kebersihan tetap kotor. Malah menurut saya agak sedikit kotor daripada dulu.”¹⁶

Tidak adanya wahana baru di Pantai Popoh menjadi tolak ukur beberapa wisatawan lokal. Pemangku kebijakan memang dirasa kurang berinovasi terhadap pemanfaatan lahan. Walaupun sarana dan prasarana dijaga dengan baik tetapi juga dibutuhkan beberapa inovasi untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Popoh.

Selain itu dari sarana transportasi dirasa kurang memadai oleh kebanyakan wisatawan. Mereka mengeluhkan sulitnya medan perjalanan untuk menuju ke Pantai Popoh. Ditambah dengan adanya kerusakan di sektor aspal, para wisatawan harus lebih berhati-hati dalam perjalanan untuk menuju ke Pantai Popoh. Seperti pernyataan dari Trisna seperti berikut :

“Jalanan di sektor Pantai Popoh harusnya lebih diperbaiki lagi. Banyaknya jalanan yang berlubang menjadi hambatan bagi wisatawan. Takutnya dengan banyaknya jalanan berlubang tersebut dapat meningkatkan resiko kecelakaan jalan yang tinggi.”¹⁷

Sektor transportasi menjadi masalah yang serius bagi pengelolaan Pantai Popoh. Jalan yang dinilai kurang memadai dapat menyebabkan resiko kecelakaan yang tinggi. Sebenarnya dulu, Pantai Popoh beserta infrastrukturnya terlihat terawat dengan rapi, seperti pernyataan Bapak Ali sebagai berikut :

“Dari panorama dan akses jalan Popoh sangat tertinggal. Dilihat dari pembangunan infrastruktur juga tidak ada perubahan. Padahal dulunya Popoh sangat terkenal dan bagus kalau dikunjungi. Tapi dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan-perubahan drastis yang dilakukan. Setau saya dulu Popoh begitu disanjung daripada Pantai lain di Tulungagung.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Bagus pada 1 Juni di Pantai Popoh

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Trisna pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan giatnya pembangunan di Pantai lain, popoh jelas tertinggal.”¹⁸

Gambar 5.1

Kondisi Jalan Yang Berlubang di Area Masuk Pantai Popoh



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2018)

Namun dari pernyataan Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi (Kasi) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

“Pemerintah setiap tahun mengadakan perbaikan jalan di sekitar pintu masuk area Pantai Popoh. Tetapi jika dilihat dari daya tahan aspal yang tidak tahan lama mungkin ini disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang datang sehingga berdampak pada banyaknya kendaraan masuk yang lalu lalang di sekitar area Pantai Popoh”¹⁹

Banyaknya truk-truk pengangkut ikan menjadi penyebab cepatnya jalan di area masuk Pantai Popoh rusak. Keberadaan Tempat Penampungan Ikan (TPI) yang berkembang pesat dengan hasil tangkap ikannya menjadi penyebab utama

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Ali pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si pada 19 Oktober 2016 di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung

banyaknya pedagang-pedagang luar kota yang berbondong-bondong untuk mencari hasil tangkap ikan langsung dari nelayan Pantai Popoh.

Walaupun dari sektor infrastruktur jalan sedikit tertinggal namun dari penunjuk jalan di sekitar Pantai Popoh dirasa sangat memadai bagi wisatawan. Wisatawan jauh yang baru pertama kali mengunjungi popoh sangat terbantu dengan adanya penunjuk jalan disekitar wilayah Pantai Popoh. Seperti pernyataan dari Bapak Bagus berikut :

“Untuk penunjuk jalan disini sangat memadai dan tersedia dengan rapi. Banyak plakat (penunjuk jalan) disekitar Pantai. Dengan keberadaan plakat (penunjuk jalan), wisatawan dari wilayah jauh sangat terbantu untuk menuju lokasi Pariwisata Pantai Popoh.”²⁰

Gambar 5.2

Plakat (penunjuk jalan) di sekitar Pantai Popoh



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2018)

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk Bagus pada 1 Juni 2018 di Pantai Popoh

Fokus pemerintah daerah di sektor lain menjadi masalah lain yang dapat mengakibatkan tertinggalnya Pantai Popoh dengan Pantai ataupun sektor lain. Semenjak Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Bapak Syahri Mulyo menggaatkan konsep membangun daerah berdasar program pemerintah pusat (Nawa Cita), sektor pariwisata menjadi fokus pembangunan mengingat besarnya potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta didukung pula dengan keberadaan Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan garis pantai.²¹

Program Nawa Cita di sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung era Bapak Syahri Mulyo mengusung program Seribu Dewi atau Seribu Desa Wisata. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan cara membangun atau menciptakan tempat-tempat wisata yang tidak hanya terfokus pada satu sektor pariwisata andalan saja. Dengan adanya program tersebut Kabupaten Tulungagung memiliki tempat wisata potensi lain selain di Popoh seperti Pantai Sidem, Pantai Munjungan, Pantai Coro, dan lain-lain.

Imbas dari kebijakan tersebut, tempat wisata Pantai Popoh sedikit terpinggirkan dengan adanya kebijakan Nawa Cita era Bapak Syahri Mulyo. Pantai Popoh yang sekarang bukan seperti tempat wisata yang seharusnya memiliki inovasi-inovasi lain di sektor pembangunan infrastruktur atau wahana-wahana wisata namun Pantai Popoh yang sekarang seperti menjadi cagar budaya beserta peninggalan-peninggalan sarana maupun infrastruktur yang seadanya.

²¹ <http://surabaya.tribunnews.com/2018/01/13/tekad-syahri-mulyo-implementasikan-nawa-cita-di-periode-kedua-memimpin-tulungagung?page=all> diakses pada 6Juli 2018 pukul 04.41 WIB

5.1.3 Disposisi

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menciptakan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek maupun obyek kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan/pengelolaan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan maupun sasaran. Karakter terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya sikap jujur dan etos kerja yang tinggi.

Sikap jujur mengarahkan pembuat kebijakan untuk tetap berada dalam fokus program yang telah ditentukan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu semangat dan antusias dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi – konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu,

hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif – perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung cukup baik.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

“PDAU, PT. Bina Samudera, Dinas Kelautan, dan Dinas Pariwisata selalu mendukung dan siap untuk melaksanakan pengelolaan sektor pantai popoh untuk menunjang pendapatan Kabupaten Tulungagung dan meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.”²²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam implementasi pengelolaan sektor pantai popoh ditanggapi dengan baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi. Karena ketika pelaksana memiliki sifat

²² Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung tanggal 31 September 2016

atau persepektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan , maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Di Indonesia seringkali terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga – lembaga Negara dan pemerintah. Pada Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di

Kabupaten Tulungagung, peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi dua. Kedua hal tersebut adalah *standart operating procedure* (SOP) dan fragmentasi.

a. *Standart Operating Procedure* (SOP)

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung sudah tersedia dengan baik oleh pemerintah daerah. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level paling tinggi hingga ke level paling rendah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing – masing dalam pengelolaan.

Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP).

Menurut Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung,

“Pada sektor pengelolaan pantai popoh sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standart prosedur. Kami dan dinas terkait lain seperti PDAU dan Dinas Perikanan selalu menjalankan pelayanan maupun pengelolaan sesuai dengan standart yang telah kami tetapkan” ²³

²³ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.Si selaku Ketua Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung tanggal 31 September 2016

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit – unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi , tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pelayanan. Konsekuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan – badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan – badan lain.

Berdasarkan penjelasan Bapak Eddith Sadewo selaku penanggung jawab Pantai Popoh sebagai berikut :

“Terdapat 4 pihak yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan pantai popoh. Keempat pihak tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, dan PT Bina Samudra.”²⁴

Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing – masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

²⁴ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Eddith Sadewo penanggung jawab popoh tanggal 31 September 2016

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan hasil pembahasan mengenai Implementasi pengelolaan sektor pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari peneliti.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan pariwisata Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Komunikasi antara pemangku kebijakan pengelolaan Pantai Popoh yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Perusahaan Daerah aneka Usaha (PDAU), Dinas Perikanan, dan PT Bina Samudra berjalan dengan baik. Namun terjadi *misskomunikasi* antara pemangku kebijakan dengan masyarakat lokal. Terbukti dengan kurang mengertinya masyarakat lokal terhadap para pemangku kebijakan di Pantai Popoh.
- 2) Para pegawai/staff di Unit Pantai Popoh mempunyai etos kerja yang sangat baik, namun kurang begitu menaruh minat kepada kebersihan pantai dan wisatawan. Begitupun sebaliknya masyarakat lokal juga kurang menaruh minat terhadap kebersihan pantai. Ini terbukti dengan kotornya kawasan pantai.yang kurang diantisipasi oleh masyarakat lokal ataupun pegawai/staff unit Pantai Popoh. Sedangkan dari sarana dan infrastruktur yang ada, faktor

penghambat berupa jalan sekitar area masuk sangat seringkali berlubang walaupun juga sering diperbaiki

- 3) Sikap pelaksanaan dalam pengelolaan sektor pantai popoh ditanggapi dengan baik oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi.
- 4) Pengelolaan pariwisata sektor Pantai Popoh oleh pemerintah daerah belum terprogram secara baik dan belum berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini bisa dilihat dimana belum adanya penanganan secara cepat dalam hal perbaikan akses jalan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran diantaranya :

- 1) Diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu kepedulian dan etos kerja kepada staff Pantai Popoh dan masyarakat lokal. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan adanya diklat atau pendidikan mengenai kepariwisataan ataupun kepedulian terhadap lingkungan.
- 2) Sarana dan prasarana harus lebih dikembangkan lagi, terutama sektor jalan yang seringkali rusak.
- 3) Kinerja pemangku kebijakan yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung, Perusahaan Aneka Usaha (PDAU), dan PT Bina Samudra harus lebih ditingkatkan lagi

supaya dapat memberikan inovasi-inovasi terhadap pengelolaan sektor Pantai Popoh.

- 4) Koordinasi antar para pihak lebih disolidkan lagi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fandeli, Chafid. 1997. *Dasar – Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Geriya, W. 1996. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal*. Denpasar: Upada Sastra.
- Wijaya, Kusumah.. 2011. Dwitagama Dedi. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Indeks.
- Solichin Abdul W. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press).
- Riant Nugroho D. 2004 *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gramedia).
- Apridar et al. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta.
- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran: Plus 36 Topik Riset Pemasaran Siap Terap*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Rahmawati (2013). Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai Dan Perikanan Di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Handoko, Andi (2004). Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen.

Suhamdani, Hidri (2013). Analisis Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang.

Biduan, Patris Gisau (2015). Strategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangehe.

Internet

“Mengintip Pariwisata Tulungagung”, escaped-traveler.com (8 juni 2014 pukul 14.05).

“Data Kunjungan Wisata : 2013 Jatim Dikunjungi Wisatawan Sebanyak 33.352.323”, disbudpar.jatimprov.go.id (diunduh pada 11 Juni 2014 pukul 00.35).

<http://kbbi.web.id/data> diunduh pada tanggal 25 April 2016 pukul 21.00

Regulasi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pantai Popoh.

Wawancara

Eddith Sadewo. Penanggung Jawab Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)

Gatot Sunu Utomo, S.Sos, M.si. Kasi Obyek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata

Misbahul Munir, S.Sos. Kasi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata

RR Sri Joeniastoeti, SE. Kasi Usaha Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata

Hadi Purwanto. Guide/Staff Pantai Popoh/Masyarakat lokal

Pita Mustikasari. Guide/Staff Pantai Popoh

Bapak Slamet. Staf Tempat Pelelangan Ikan Pantai Popoh/Pegawai Dinas
Perikanan

Bapak Agus. Wisatawan

Bapak Ali. Wisatawan

Ibu Khotimah. Pedagang/Masyarakat Lokal

Trisna. Wisatawan

Bapak Anton. Staff PT Bina Samudra

